

## STUDI KOMPARASI ANTARA TINGKAT CAPAIAN IMPLEMENTASI *E-GOVERNMENT* LAPAN DENGAN LPNK LAINNYA

Igif G. Prihanto

Pusat Pengkajian dan Informasi Kedirgantaraan,  
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional  
E-mail : igprihanto@yahoo.com

### ABSTRACT

This study aims to (i) determine level achievement of the e-Government implementation at the level *Non-Ministrial Government Institutions (LPNK)* in Indonesia based on the dimensions of policy, institutional, infrastructure, applications and planning; and (ii) determine a comparative level achievement of the LAPAN e-Government implementation with other LPNK at the national level. The method of data analysis used Friedman statistical test. The study shows that (i) there are significant differences in the level achievements of e-Government implementation at the level LPNK in Indonesia based on the dimensions of policy, institutional, infrastructure, applications and planning; and (ii) The level achievement of LAPAN e-Government implementation better than with BSN, LKPP, BMKG, BAPETEN, LEMSANEG, BKN, BPN, BKPM, BNP2TKI, BASARNAS, BNN, LAN and BNPT but still much lower than BPS, BPPT, PNRI, BIG, LIPI, BNPB, LEMHANAS, BPKP, BKKBN and BATAN. In addition, the level achievement of LAPAN e-Government implementation for dimensional applications proved to be much better when compared with the dimensions of planning, policy, and institutional infrastructure.

*Keywords: E-Government, E-Government Ranking Indonesia (PeGI), Non-Ministrial Government Institutions (LPNK), Uji Friedmen.*

### ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk (i) mengetahui perbedaan tingkat capaian implementasi *e-Government* pada tingkat LPNK di Indonesia berdasarkan dimensi kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi dan perencanaan; dan (ii) mengetahui komparasi tingkat capaian implementasi *e-Government* LAPAN dengan LPNK lainnya pada tingkat nasional. Metode analisis data yang digunakan pada studi ini ialah uji statistik Friedman. Hasil studi menunjukkan bahwa (i) terdapat perbedaan tingkat capaian implementasi *e-Government* yang signifikan pada tingkat LPNK di Indonesia berdasarkan dimensi kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi dan perencanaan; dan (ii) Tingkat capaian implementasi *e-Government* LAPAN jauh lebih baik dibanding dengan BSN, LKPP, BMKG, BAPETEN, LEMSANEG, BKN, BPN, BKPM, BNP2TKI, BASARNAS, BNN, LAN dan BNPT tetapi masih jauh lebih rendah dari BPS, BPPT, PNRI, BIG, LIPI, BNPB, LEMHANAS, BPKP, BKKBN dan BATAN. Selain itu t tingkat capaian implementasi *e-Government* LAPAN untuk dimensi aplikasi ternyata jauh lebih baik apabila dibanding dengan dimensi perencanaan, kebijakan, infrastruktur dan kelembagaan.

*Kata Kunci: E-Government, Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI), Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), Uji Friedmen.*

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

*E-Government* menurut PBB didefinisikan sebagai penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan penerapannya oleh pemerintah untuk menyediakan informasi dan layanan publik kepada masyarakat (Alshomrani, 2012). New Zealand mendefinisikan *e-Government* sebagai sebuah cara bagi pemerintahan untuk menggunakan sebuah teknologi baru untuk melayani masyarakat dengan memberikan kemudahan akses untuk pemerintah dalam hal pelayanan dan informasi (Sinambela, 2001). Konsep *e-Government* menciptakan interaksi yang ramah, nyaman, transparan dan murah antara pemerintah dan masyarakat (*G2C - Government to Citizens*), pemerintah dan perusahaan bisnis (*G2B - Government to Business*) dan hubungan antar pemerintah (*G2G - Government to Government*). Pada intinya *e-Government* merupakan penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara Pemerintah dan pihak-pihak lain, yang menghasilkan hubungan *G2C*, *G2B*, dan *G2G* (Indrajit, 2002). Dalam prakteknya *e-Government* merupakan penggunaan internet untuk melaksanakan urusan pemerintah dan penyediaan pelayanan publik yang lebih baik dengan cara yang berorientasi pada pelayanan masyarakat (Sufianti, 2007).

Di negara-negara maju, *e-Government* merupakan hasil transformasi mekanisme interaksi birokrasi dengan masyarakat yang menjadi lebih bersahabat. Demikian halnya di negara berkembang, banyak pengambil kebijakan yakin bahwa pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan transparan dapat diwujudkan melalui *e-Government* (Holle, 2011). Sampai saat ini beberapa negara maju dan negara berkembang masih terus melakukan pengembangan *e-Government* sesuai dengan karakteristik dan kemampuan masing-masing negara (Hasibuan, 2007). Negara-negara maju memandang bahwa implementasi *e-Government* yang tepat akan secara signifikan memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat di suatu negara secara khusus, dan masyarakat dunia secara umum (Istiyanto dan Sutanta, 2012). Oleh karena itu implementasi *e-Government* di suatu negara, selain tidak dapat ditunda-tunda harus pula dilaksanakan secara serius, di bawah suatu kepemimpinan dan kerangka pengembangan yang holistik, yang pada akhirnya akan memberikan/mendatangkan keunggulan kompetitif secara nasional (Indrajit, 2002). Adopsi *e-Government* dalam implementasinya telah meningkat di sebagian besar negara, tetapi pada waktu yang sama kecepatan adopsinya bervariasi antara negara satu dengan negara lainnya (Furuholt dan Fathul, 2008).

Hasil penelitian Heeks di 40 pemerintah negara-negara berkembang dan transisi yang dikutip oleh Al-adawi (2005) juga menunjukkan bahwa sebanyak 35% implementasi *e-Government* ini bisa dikategorikan sebagai kegagalan total, sementara 50% pemerintah separuh gagal mengimplementasikan *e-Government*. Dari sekian banyak, hanya sebesar 15% pemerintah yang sukses menjalankannya. Dalam proses implementasi, ditemukan beberapa fenomena yang menunjukkan implementasi *e-Government* masih berjalan lambat dan tidak signifikan dengan besarnya biaya yang dikeluarkan Negara (Sari dan Winarno, 2012). Di Indonesia realisasi pengembangan *e-Government* masih menghadapi banyak tantangan baik dalam hal geografi, ekonomi, teknologi, politik, maupun budaya. Bahkan implementasi *e-Government* di Indonesia masih setengah jalan, sehingga diperlukan penyempurnaan konsep dan strategi pelaksanaan *e-Government* (Sosiawan, 2008).

Kebijakan pemerintah Indonesia terkait dengan *e-Government* tersebut antara lain dituangkan dalam bentuk Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*, dan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Pengembangan *e-Government* yang merupakan wujud keinginan pemerintah dalam upaya mendorong bangsa Indonesia menuju masyarakat yang berbasis pengetahuan (*knowledge-based society*) (Hasibuan, 2007). Dalam pelaksanaannya, Inpres ini menginstruksikan salah satunya kepada Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian (saat itu Lembaga Pemerintah Non Departemen) untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing guna terlaksananya pengembangan *e-Government* secara nasional, dan merumuskan rencana tindak di lingkungan instansi masing-masing dengan berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (saat itu Menteri Negara Komunikasi dan Informasi). Inpres tersebut berisikan panduan tentang Strategi Pengembangan *e-Government* yang sudah disosialisasikan, antara lain (a) panduan tentang *e-Government*, (b) panduan pembangunan infrastruktur portal pemerintah, (c) panduan manajemen sistem dokumen elektronik pemerintah, (d) panduan rencana induk pengembangan *e-Government* lembaga, (e) panduan penyelenggaraan situs web pemerintah daerah, dan (f) panduan tentang pendidikan dan pelatihan SDM *e-Government*.

Sejak dikeluarkan Inpres tersebut, berbagai Instansi pemerintah (termasuk LPNK) mulai mengadopsi *e-Government* dengan berbagai metode dan tahapan (Junaidi, 2011). Beberapa Kementerian/Lembaga di Indonesia berlomba-lomba menjadi yang terdepan dalam implementasi *e-Government* (Handayani dan Kardia, 2010). Banyaknya Kementerian/Lembaga yang berinisiatif mengimplementasikan *e-Government* antara lain merumuskan kebijakan dengan menyusun *blueprint e-Government*, menyusun kelembagaan organisasi struktur *e-Government* yang lengkap dengan tugas pokok dan fungsinya, membangun infrastruktur jaringan komunikasi dan informasi pendukung *e-Government* (*website*, LAN, WAN, dan akses internet), membangun aplikasi layanan *e-Government* (*e-billing*, *e-procurement*, *e-reporting*) dan menyusun perencanaan tata kelola dan manajemen perencanaan *e-Government*. Adopsi *e-Government* juga semakin meningkat dari tahun ke tahun pada sebagian besar lembaga pemerintah di Indonesia. Meskipun pada saat yang sama kemampuan dan kecepatan adopsinya berbeda-beda antara satu lembaga dengan lembaga lainnya, sehingga ada yang melaju dengan cepat tetapi ada juga yang masih lambat sehingga tertinggal secara nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kesiapan dan capaian implementasi *e-Government* pada Kementerian/Lembaga pemerintah dari tahun ke tahun akan selalu berbeda-beda. Meskipun demikian hal ini tentu tetap harus disikapi positif karena sudah mulai muncul sikap terbuka terhadap perkembangan TIK untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat luas.

Kemenkominfo RI pada tahun 2014 telah menyelenggarakan Pemingkatan *e-Government* Indonesia (PeGI) dengan instansi-instansi pemerintah di seluruh wilayah Indonesia, salah satunya dilakukan pada tingkat LPNK berdasarkan dimensi kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan. Hasil PeGI ini dapat digunakan untuk mengetahui tingkat kesiapan dan capaian implementasi *e-Government* pada tingkat LPNK di Indonesia dan sekaligus mencari penyebab mengapa mereka lebih baik atau tertinggal secara nasional. Melalui PeGI ini dapat ditentukan ada atau tidaknya perbedaan yang signifikan untuk tingkat capaian implementasi *e-Government* pada tingkat LPNK di

Indonesia berdasarkan dimensi kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan.

## 1.2 Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi permasalahan pada penelitian ini ialah (1) adakah perbedaan tingkat capaian implementasi *e-Government* pada tingkat LPNK di Indonesia berdasarkan dimensi kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi dan perencanaan? (2) bagaimana komparasi tingkat capaian implementasi *e-Government* LAPAN dengan LPNK lainnya pada tingkat nasional?

## 1.3 Tujuan

Dengan mengacu pada permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui perbedaan tingkat capaian implementasi *e-Government* pada tingkat LPNK di Indonesia berdasarkan dimensi kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi dan perencanaan; dan (2) mengetahui komparasi tingkat capaian implementasi *e-Government* LAPAN dengan LPNK lainnya pada tingkat nasional.

## 1.4 Hipotesis

Dari permasalahan dan tujuan penelitian tersebut, maka hipotesis yang diajukan pada penelitian ini ialah ada perbedaan tingkat capaian implementasi *e-Government* pada tingkat LPNK di Indonesia berdasarkan dimensi kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi dan perencanaan.

## 2. METODOLOGI

### 2.1 Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan pada studi ini ialah data PeGI dari 24 LPNK di Indonesia tahun 2014 berdasarkan dimensi kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan. Masing-masing dimensi tersebut memiliki bobot yang sama dalam penilaian karena semuanya penting dan saling terkait dan saling menunjang antara satu dengan yang lainnya (Fitriansyah dkk, 2013).

Dalam evaluasinya, dimensi dan indikator penilaian PeGI yang digunakan oleh Kemenkominfo (Ariyani, 2013; Fitriansyah, 2013; Hernikawati, 2013) yaitu:

- a) dimensi kebijakan, meliputi visi dan misi berkaitan dengan TIK, strategi penetapan kebijakan, pedoman, peraturan, ketetapan instansi, anggaran, skala prioritas, dan audit;
- b) dimensi kelembagaan, meliputi keberadaan organisasi, tugas pokok dan fungsi, standar operasional prosedur, sumber daya manusia (SDM), dan pengembangan SDM;
- c) dimensi infrastruktur, meliputi *data center*, jaringan data, keamanan, fasilitas pendukung infrastruktur TIK, *disaster recovery*, pemeliharaan TIK, dan inventaris peralatan TIK;

- d) dimensi aplikasi, meliputi situs wajib (*homepage*), pelayanan, administrasi dan manajemen, legislasi, pembangunan, keuangan, kepegawaian, manual petunjuk aplikasi TIK, dan inventaris aplikasi TIK; dan
- e) dimensi perencanaan, meliputi pengorganisasian/ fungsi, dokumen *master plan*, sistem perencanaan, implementasi *master plan* dan pembiayaan.

Metode pengumpulan data pada studi ini dilakukan melalui dokumentasi, dengan cara pemeriksaan dan pencatatan terhadap hasil PeGI Tahun 2014 dari Direktorat Jendral Aplikasi Informatika, Kemenkominfo RI tahun 2014. Metode ini sengaja dipilih dengan pertimbangan karena keuntungan penelitian menggunakan dokumentasi adalah biayanya relatif murah, waktu dan tenaga efisien (Usman dan Purnomo, 1996). Dalam penilaian PeGI Kemenkominfo menggunakan skala satu sampai dengan empat, dan penentuan kategorinya dengan pemberian skor, yakni kategori sangat kurang baik (1,0 sampai dengan 1,49), kurang baik (1,5 sampai dengan 2,49), baik (2,5 sampai dengan 3,49), dan sangat baik (3,5 sampai dengan 4,0).

## 2.2 Metode Analisis Data

Untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian yang telah ditetapkan maka data PeGI tersebut akan dianalisis dengan menggunakan uji statistik nonparametrik dengan uji Friedman. Adapun untuk komparasi LAPAN dengan LPNK lainnya akan dilakukan analisis deskriptif. Langkah pengujiannya diawali dengan menyusun pengolahan data dan perhitungannya disusun ke dalam suatu tabel dua arah yang mempunyai  $n$  baris dan  $k$  kolom. Baris menunjukkan subjek dan kolom menunjukkan kondisi. Selanjutnya, data kondisi untuk masing-masing subyek disusun dalam bentuk jenjang (*ranking*). Pengujian Friedman ini digunakan untuk menentukan apakah jumlah keseluruhan jenjang ( $R_j$ ) berbeda secara nyata. Formulasi Friedmen (Djarwanto, 1995) sebagai berikut:

$$\chi^2_r = \frac{12}{nk(k+1)} \sum_{j=1}^k (R_j)^2 - 3n(k+1)$$

dengan ketentuan:

$k$  adalah banyak sampel (banyak dimensi),

$n$  adalah banyak kasus dalam semua sampel (banyaknya LPNK yang mengikuti PeGI),

$R_j$  adalah jumlah nilai *ranking* ke- $j$ ,

$\sum_{j=1}^k$  adalah jumlah seluruh  $k$  sampel mendekati distribusi Chi-Kuadrat dengan derajat

kebebasan (db)= $k-1$

Interpretasi hasil pengujian tersebut dilakukan dengan membandingkan nilai hitung  $\chi^2_r$  dengan nilai tabel Chi-Kuadrat  $\chi^2_{\alpha, k-1}$  untuk derajat kebebasan (db) =  $k-1$  dan tingkat signifikan  $\alpha = 0,05$ . Apabila nilai  $\chi^2_r > \chi^2_{\alpha, k-1}$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima pada tingkat signifikan tersebut. Ini berarti terdapat perbedaan tingkat capaian implementasi *e-Government* yang signifikan pada tingkat LPNK di Indonesia berdasarkan dimensi kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan. Sebaliknya apabila nilai  $\chi^2_r \leq \chi^2_{\alpha, k-1}$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak pada tingkat signifikan tersebut. Ini berarti tidak terdapat perbedaan capaian implementasi *e-Government* yang signifikan pada

tingkat LPNK di Indonesia berdasarkan dimensi kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Hasil

LPNK yang mengikuti PeGI pada tingkat LPNK di Indonesia tahun 2014 berdasarkan dimensi kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan ada sebanyak 24 LPNK (lihat Tabel 3-1).

Tabel 3-1: Data PeGI LPNK Di Indonesia Tahun 2014

No	LPNK	Dimensi PeGI				
		Kebijakan	Kelembagaan	Infrastruktur	Aplikasi	Perencanaan
1	BPS	3.08	3.40	3.10	3.20	3.00
2	BPPT	3.17	3.00	3.33	2.97	3.07
3	PNRI	3.13	2.87	3.29	2.97	3.13
4	BIG	2.71	3.20	3.05	2.87	3.07
5	LIPI	2.88	3.00	3.10	3.17	2.53
6	BNPB	2.88	2.93	2.62	2.57	3.13
7	LEMHANAS	2.75	3.07	2.96	2.50	2.93
8	BPKP	2.50	3.13	2.81	2.93	2.60
9	BKKBN	2.50	2.87	3.00	2.57	2.73
10	BATAN	2.54	2.87	2.62	2.63	2.67
11	LAPAN	2.50	2.53	2.57	3.03	2.67
12	BSN	2.08	2.80	2.81	2.90	2.60
13	LKPP	2.58	2.53	2.52	2.73	2.53
14	BMKG	2.33	2.80	2.90	3.03	1.80
15	BAPETEN	2.17	2.80	2.52	2.73	2.53
16	LEMSANEG	2.53	2.50	2.54	2.50	2.45
17	BKN	2.25	2.73	2.52	2.67	1.93
18	BPN	1.67	2.67	2.52	2.77	2.33
19	BKPM	1.83	2.53	2.95	2.53	1.53
20	BNP2TKI	1.88	2.27	2.67	2.80	1.60
21	BASARNAS	1.88	2.33	2.48	2.00	2.40
22	BNN	1.50	2.27	2.48	2.47	1.67
23	LAN	1.83	1.80	2.33	2.13	1.80
24	BNPT	1.50	1.53	1.71	1.73	1.13
Rata-rata		2,36	2,68	2,72	2,68	2,41

Sumber: Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika - Kemenkominfo RI, 2014

Dari 24 LPNK tersebut menunjukkan bahwa hanya ada 16 LPNK (BPS, BPPT, PNRI, BIG, LIPI, BNPB, LEMHANAS, BPKP, BKKBN, BATAN, LAPAN, BSN, LKPP, MKG, BAPETEN, LEMSANEG) dengan tingkat capaian implementasi *e-Government*nya telah berkategori baik dan 8 LPNK (BKN, BPN, BKPM, BNP2TKI, BASARNAS, BNN, LAN, BNPT) masih berkategori kurang baik. Hasil PeGI tersebut juga menempatkan Badan Pusat Statistik (BPS) menduduki posisi sebagai peringkat pertama, kemudian secara berturut-turut disusul Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) sebagai peringkat kedua, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI) sebagai peringkat ketiga dan sebagai peringkat terendah diduduki oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Adapun rata-rata tingkat capaian implementasi *e-Government* pada LPNK di Indonesia menunjukkan bahwa dimensi

infrastruktur menduduki posisi pada peringkat pertama, kemudian secara berturut-turut disusul dimensi kelembagaan peringkat kedua, dimensi aplikasi peringkat ketiga, dimensi perencanaan peringkat keempat, dan terakhir dimensi kebijakan peringkat kelima.

## 3.2 Pembahasan

### 3.2.1 Pengujian Perbedaan Implementasi *E-Government* Tingkat LPNK

Pengujian ini diawali dengan memberikan hipotesis nihil ( $H_0$ ) dan hipotesis alternatif ( $H_1$ ) sebagai berikut:

$H_0$  : tidak terdapat perbedaan tingkat capaian implementasi *e-Government* pada tingkat LPNK di Indonesia berdasarkan dimensi kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan.

$H_1$  : terdapat perbedaan tingkat capaian implementasi *e-Government* pada tingkat LPNK di Indonesia berdasarkan dimensi kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan.

Langkah berikutnya ialah melakukan konversi data pemeringkatan LPNK berdasarkan dimensi PeGI yang diobservasi dengan menggantikan *ranking*nya dalam satu rangkaian (satu baris). Data yang terbesar digantikan dengan *ranking* satu, yang setingkat di bawah yang terbesar dengan *ranking* dua, dan yang terkecil dengan *ranking* n. Apabila memiliki nilai *ranking* yang sama maka nilai *ranking*nya di rata-rata. Hasil konversi data PeGI disajikan pada Tabel 3-2.

Tabel 3-2: Ranking Data Pemeringkatan LPNK di Indonesia Berdasarkan Dimensi

No	LPNK	Dimensi PeGI				
		Kebijakan	Kelembagaan	Infrastruktur	Aplikasi	Perencanaan
1	BPS	4	1	3	2	5
2	BPPT	2	4	1	5	3
3	PNRI	2,5	5	1	4	2,5
4	BIG	5	1	3	4	2
5	LIPI	4	3	2	1	5
6	BNPB	3	2	4	5	1
7	LEMHANAS	5	1	2	4	3
8	BPKP	5	1	3	2	4
9	BKKBN	5	2	1	4	2
10	BATAN	5	1	4	3	2
11	LAPAN	5	4	3	1	2
12	BSN	5	3	2	1	4
13	LKPP	2	2,5	5	1	2,5
14	BMKG	4	3	2	1	5
15	BAPETEN	5	1	4	2	3
16	LEMSANEG	2	3,5	1	3,5	4
17	BKN	4	1	3	2	5
18	BPN	5	2	3	1	4
19	BKPM	4	2,5	1	2,5	5
20	BNP2TKI	4	3	2	1	5
21	BASARNAS	5	3	1	4	2
22	BNN	5	3	1	2	4
23	LAN	2	4,5	1	2	4,5
24	BNPT	4	3	2	1	5
Jumlah Ranking		$R_1=97,5$	$R_2=62$	$R_3=55$	$R_4=64$	$R_5=83$

Sumber: Diolah dari hasil PeGI LPNK di Indonesia tahun 2014



Selanjutnya nilai-nilai  $n$ ,  $k$  dan  $R_j$  dari hasil konversi data tersebut dimasukkan ke formulasi Friedman. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai hitung  $\chi_r^2 = 1449,942$  lebih besar dari nilai tabel Chi-Kuadrat  $\chi_{\alpha, k-1}^2 = 9,488$  atau  $\chi_r^2 = 1449,942 > \chi_{\alpha, k-1}^2 = 9,488$  untuk derajat kebebasan  $(db) = 4$  dan tingkat signifikan  $\alpha = 0,05$ . Ini berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima pada tingkat signifikan tersebut. Jadi hasil pengujian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan tingkat capaian implementasi *e-Government* yang sangat signifikan pada tingkat LPNK di Indonesia berdasarkan dimensi kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi dan perencanaan.

Secara kuantitatif perbedaan tingkat capaian implementasi *e-Government* pada tingkat LPNK tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Dimensi kebijakan. Tabel 3-1 untuk dimensi kebijakan menunjukkan bahwa (a) ada 13 LPNK (54,17% dari 24 LPNK) telah berhasil dengan baik (berkategori baik) dalam implementasi *e-Government*nya di Indonesia, yaitu BPS, BPPT, PNRI, BIG, LIPI, BNPB, LEMHANAS, BPKP, BKKBN, BATAN, LAPAN, LKPP dan LEMSANEG. (b) ada 11 LPNK (48,83% dari 24 LPNK) belum berhasil dengan baik (berkategori kurang baik) dalam implementasi *e-Government*nya, yaitu BSN, BMKG, BAPETEN, BKN, BPN, BKPM, BNP2TKI, BASARNAS, BNN, LAN dan BNPT.

Keberadaan posisi LPNK pada kedua tingkat kategori yang berbeda tersebut (kategori baik dan kurang baik) semakin menunjukkan adanya perbedaan tingkat kesiapan dan capaian implementasi *e-Government* yang signifikan pada tingkat LPNK di Indonesia. Perbedaan tersebut terjadi karena adanya kemauan dan kemampuan adopsi *e-Government* yang berbeda-beda antara LPNK satu dengan LPNK lain, khususnya antara LPNK yang telah berkategori baik dan yang berkategori kurang baik. LPNK yang berkategori baik (BPS dan BPPT) maka tingkat capaian implementasi *e-Government*nya jauh lebih tinggi dan melaju lebih cepat dibanding dengan LPNK yang berkategori kurang baik (BNN dan BNPT). Bagi LPNK yang berkategori kurang baik maka tingkat capaian implementasi *e-Government*nya kelihatan sangat lambat atau tertinggal secara nasional dalam implementasi *e-Government*nya. Kelambatan tersebut disebabkan oleh adanya beberapa LPNK yang tidak memiliki dokumen-dokumen resmi, seperti *blueprint* atau rencana strategis pengembangan *e-Government*, surat keputusan, peraturan, pedoman untuk penentuan dan penetapan arah dan tujuan, program kerja, tata cara atau pengaturan bagi pengembangan dan implementasi *e-Government* di lingkungan lembaganya. Kondisi seperti inilah yang mengakibatkan program kerja dan tata cara implementasi *e-Government* di lingkungan LPNK untuk dimensi kebijakan tersebut menjadi terhambat sehingga menjadi tidak terarah, kurang efisien dan kurang efektif.

- b. Dimensi kelembagaan. Tingkat capaian implementasi *e-Government* untuk dimensi kelembagaan ini tidak jauh berbeda dengan dimensi kebijakan, karena hasil evaluasi PeGInya ternyata sama-sama hanya berkategori baik dan kurang baik. Artinya tidak ada yang berkategori sangat baik atau sangat kurang baik. Kondisi ini tidak bisa dipungkiri karena Tabel 3-1 untuk dimensi kelembagaan menunjukkan bahwa ada sebanyak 79,17% dari 24 LPNK di Indonesia (BPS, BPPT, PNRI, BIG, LIPI, BNPB, LEMHANAS, LAPAN, BPKP, BKKBN, BATAN, LAPAN, LKPP, LEMSANEG,



BSN, BMKG, BAPETEN, BKN, BPN dan BKPM) yang mengikuti PeGI telah berhasil dengan baik (berkategori baik) dalam implementasi *e-Government*nya. Sementara LPNK lainnya sebanyak 20,83% dari 24 LPNK di Indonesia (BNP2TKI, BASARNAS, BNN, dan BNPT) belum berhasil dengan baik (berkategori kurang baik) dalam implementasi *e-Government*nya.

Keberadaan posisi LNPk pada kedua tingkat kategori yang berbeda tersebut (kategori baik dan kurang baik) semakin menunjukkan bahwa ada perbedaan tingkat kesiapan dan capaian implementasi *e-Government* yang signifikan pada tingkat LPNK di Indonesia. Perbedaan ini terjadi karena kemauan dan kemampuan adopsi *e-Government* yang tidak sama antara LPNK satu dengan LPNK lain, khususnya antara LPNK yang telah berkategori baik dan yang berkategori kurang baik. LPNK yang berkategori baik (BPS dan BIG) maka tingkat capaian implementasi *e-Government*nya jauh lebih tinggi dan tentu melaju lebih cepat dibanding dengan LPNK berkategori kurang baik (BNPT). Bagi LPNK yang berkategori kurang baik maka tingkat capaian implementasi *e-Government*nya kelihatan sangat lambat atau tertinggal secara nasional dalam implementasi *e-Government*. Kelambatan ini secara umum antara lain disebabkan oleh adanya beberapa LPNK yang tidak memiliki organisasi yang berwenang dan bertanggung jawab dalam pengembangan dan pemanfaatan TIK, seperti belum adanya keberadaan organisasi struktural yang lengkap dengan tugas pokok dan fungsi yang jelas, jenjang karier, dan status kepegawaian serta kewenangan yang cukup. Kondisi ini yang mengakibatkan program kerja dan tata cara implementasi *e-Government* di lingkungan LPNK yang terkait dengan dimensi kelembagaan tersebut mengalami kesulitan dalam melakukan koordinasi sehingga pelaksanaannya menjadi kurang optimal.

- c. Dimensi Infrastruktur. Tingkat capaian implementasi *e-Government* LPNK untuk dimensi infrastruktur tersebut secara keseluruhan ternyata tidak jauh berbeda dengan dimensi kebijakan dan dimensi kelembagaan karena tingkat capaian implementasi *e-Government* untuk dimensi infrastruktur ini sama-sama hanya berkategori baik dan kurang baik. Kondisi ini ditunjukkan pada Tabel 3-1 untuk dimensi infrastruktur 83,33% dari 24 LPNK di Indonesia (BPS, BPPT, PNRI, BIG, LIPI, BNPB, LEMHANAS, LAPAN, BPKP, BKKBN, BATAN, LAPAN, LKPP, LEMSANEG, BSN, BMKG, BAPETEN, BKN, BPN, BKPM, BNP2TKI) telah berhasil dengan baik (berkategori baik) dan 16,67% LPNK lainnya (BASARNAS, BNN, LAN dan BNPT) masih belum berhasil dengan baik dalam pengembangan *e-Government*nya.

Keberadaan posisi LNPk pada kedua tingkat kategori yang berbeda tersebut (kategori baik dan kurang baik) semakin menunjukkan adanya perbedaan tingkat kesiapan dan capaian implementasi *e-Government* yang signifikan pada tingkat LPNK di Indonesia. Perbedaan ini terjadi karena adanya kemauan dan kemampuan adopsi *e-Government* yang berbeda-beda antara LPNK satu dengan LPNK lain, khususnya antara LPNK yang telah berkategori baik dan yang berkategori kurang baik. LPNK yang berkategori baik (BPPT dan PNRI) maka tingkat capaian implementasi *e-Government*nya jauh lebih tinggi dan melaju lebih cepat dibanding dengan LPNK berkategori kurang baik (BNPT). Bagi LPNK yang berkategori kurang baik maka tingkat capaian implementasi *e-Government*nya kelihatan sangat lambat atau tertinggal secara nasional dalam

implementasi *e-Government*. Kelambatan ini secara umum antara lain disebabkan oleh adanya beberapa LPNK yang tidak memiliki sarana dan prasana yang memadai untuk mendukung pengembangan dan pemanfaatan TIK, misalnya: belum tersedianya jaringan komunikasi (LAN, WAN, dan akses internet), perangkat keras dan lunak pada pengguna (desktop, notebook, dan lain-lain), saluran layanan atau *service delivery channel* (berbasis web, telepon, sms dan lain-lain), dan fasilitas pendukung (AC, UPS, Genset, sarana pengamanan fasilitas lainnya). Kondisi ini yang mengakibatkan program kerja dan tata cara implementasi *e-Government* di lingkungan LPNK yang terkait dengan dimensi infrastruktur tersebut mengalami kesulitan dalam melakukan komunikasi data dan informasi antar pemerintah, kalangan bisnis dan masyarakat sehingga pelaksanaannya menjadi kurang optimal.

- d. Dimensi Aplikasi. Tingkat capaian implementasi *e-Government* untuk dimensi aplikasi ini juga tidak jauh berbeda dengan dimensi kebijakan, kelembagaan dan infrastruktur karena hasil evaluasi PeGInya sama-sama hanya berkategori baik dan kurang baik, dan tidak ada yang berkategori sangat baik atau kurang baik. Kondisi ini ditunjukkan pada Tabel 3-1 untuk dimensi aplikasi menunjukkan bahwa ada sebanyak 83,33% dari 24 LPNK di Indonesia (BPS, BPPT, PNRI, BIG, LIPI, BNPB, LEMHANAS, LAPAN, BPKP, BKKBN, BATAN, LAPAN, LKPP, LEMSANEG, BSN, BMKG, BAPETEN, BKN, BPN, BKPM, dan BNP2TKI) yang telah berhasil dengan baik (karena berkategori baik) dalam implementasi *e-Government*-nya. Adapun sebanyak 16,67% LPNK lainnya (BASARNAS, BNN, LAN dan BNPT) masih belum berhasil dengan baik (kategori kurang baik) dalam implementasi *e-Government*-nya.

Keberadaan posisi LPNK pada kedua tingkat kategori yang berbeda tersebut (kategori baik dan kurang baik) semakin menunjukkan adanya perbedaan tingkat kesiapan dan capaian implementasi *e-Government* yang signifikan pada tingkat LPNK di Indonesia. Perbedaan ini terjadi karena adanya kemauan dan kemampuan adopsi *e-Government* yang berbeda-beda antara LPNK satu dengan LPNK yang lain untuk dimensi ini sehingga ada LPNK yang melaju dengan cepat (BPS, BPPT dan PNRI) tetapi ada juga yang lambat (BNPT) sehingga tertinggal secara nasional. Kelambatan ini disebabkan oleh adanya beberapa LPNK yang tidak menyediakan berbagai aplikasi pendukung layanan *e-Government*, seperti pelayanan publik, administrasi dan manajemen, legistasi, pembangunan, keuangan, kepegawaian, pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan baik secara langsung atau tidak langsung. Kondisi ini yang mengakibatkan program kerja dan tata cara implementasi *e-Government* di lingkungan LPNK yang terkait dengan dimensi aplikasi tersebut mengalami kesulitan dalam membangun berbagai aplikasi fungsi *e-Government* sehingga pelaksanaannya menjadi kurang optimal.

- e. Dimensi perencanaan. Tingkat capaian implementasi *e-Government* LPNK untuk dimensi perencanaan ini ternyata berbeda dengan dimensi kebijakan, dimensi kelembagaan, dan dimensi aplikasi. Hal ini karena tingkat capaian implementasi *e-Government* untuk dimensi perencanaan ini selain berkategori baik dan kurang baik ternyata ada satu LPNK yang tingkat capaian implementasinya masih berkategori sangat kurang baik. Kondisi ini tidak bisa dipungkiri karena berdasarkan Tabel 3-1 untuk dimensi perencanaan menunjukkan bahwa ada sebanyak 58,33% dari 24 LPNK

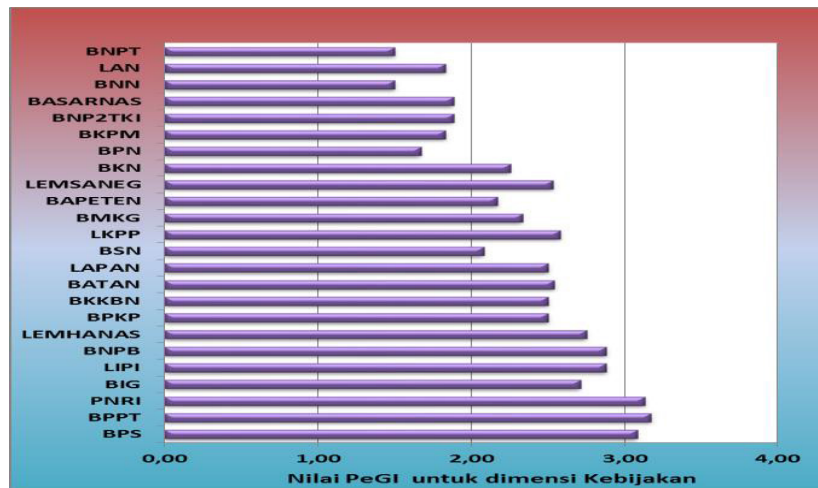
di Indonesia (BPS, BPPT, PNRI, BIG, LIPI, BNPB, LEMHANAS, LAPAN, BPKP, BKKBN, BATAN, LAPAN, LKPP dan BAPETEN) yang telah berhasil dengan baik tingkat capaian implementasi *e-Government* dan sebanyak 37, 49% LPNK Indonesia (LEMSANEG, BSN, BMKG, BKN, BPN, BKPM, BNP2TKI, BASARNAS, BNN, dan LAN) belum berhasil dengan baik serta 4,17% LPNK lainnya (BNPT) tingkat capaian implementasi *e-Government* masih sangat kurang baik.

Keberadaan posisi LPNK pada ketiga tingkat kategori yang berbeda tersebut (kategori baik dan kurang baik) semakin menunjukkan adanya perbedaan tingkat kesiapan dan capaian implementasi *e-Government* yang signifikan pada tingkat LPNK di Indonesia. Perbedaan ini terjadi karena adanya kemampuan adopsi *e-Government* yang berbeda-beda antara LPNK satu dengan LPNK yang lain untuk dimensi ini sehingga ada LPNK yang melaju dengan cepat (BPS, BPPT dan PNRI), lambat (BNPT) bahkan sangat lambat (BPN dan BASARNAS) sehingga tertinggal secara nasional. Kelambatan ini disebabkan oleh adanya beberapa LPNK yang perencanaannya tidak terkait dengan tata kelola dan manajemen perencanaan dalam pengembangan *e-Government* dan tidak dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan. Kondisi ini yang mengakibatkan program kerja dan tata cara implementasi *e-Government* di lingkungan LPNK yang terkait dengan dimensi perencanaan tersebut mengalami kesulitan dalam melakukan koordinasi sehingga pelaksanaannya menjadi kurang optimal.

### 3.2.2 Komparasi *E-Government* LAPAN dengan LPNK lainnya

Komparasi tingkat capaian implementasi *e-Government* LAPAN dengan LPNK lainnya dapat dijelaskan secara deskriptif melalui gambar grafik untuk masing-masing dimensi dengan cara sebagai berikut:

- a. Dimensi kebijakan. Hasil PeGI pada tingkat LPNK di Indonesia tahun 2014 untuk dimensi kebijakan ini ternyata telah menempatkan posisi LAPAN dalam implementasi *e-Government* berada dalam kategori baik dan menduduki posisi pada peringkat ke-11 dari 24 LPNK yang mengikuti PeGI. Keberhasilan implementasi *e-Government* LAPAN dalam menduduki posisi ini apabila dikomparasikan dengan LPNK yang lain dapat dikatakan jauh lebih baik (lebih tinggi) dibanding dengan BPKP, BKKBN, BMKG, BKN, BAPETEN, BSN, BKPM, BNP2TKI, BASARNAS, LAN, BPN, BNN, dan BNPT. Meskipun demikian, tidak bisa dipungkiri bahwa keberhasilan LAPAN tersebut ternyata juga masih ketinggalan jauh (lebih rendah) apabila dibanding dengan BPPT, PNRI, BPS, LIPI, BNPB, BIG, LEMHANAS, LKPP, BATAN, dan LEMSANEG. Komparasi LAPAN dengan LPNK lainnya untuk dimensi kebijakan disajikan pada Gambar 3-1.



Sumber: Diolah dari hasil PeGI LPNK Tahun 2014 untuk dimensi kebijakan

Gambar 3-1: Capaian Implementasi *E-Government* LPNK Tahun 2014 Berdasarkan Dimensi Kebijakan

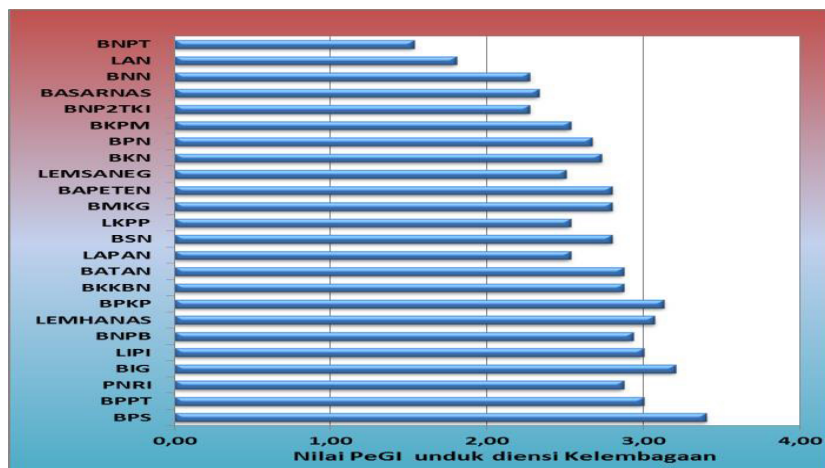
Untuk mengejar ketertinggalan tersebut, maka LAPAN harus segera mengakselerasi implementasi *e-Government*nya untuk dimensi kebijakan, dengan cara sebagai berikut:

- 1) merumuskan visi dan misi dengan jelas terutama yang berkaitan dengan pengembangan TIK agar semua sinkron dan fokus dalam mendukung pengembangan *e-Government*;
- 2) mengimplementasikan *Materplan TI* sebagai *blueprint* atau rencana strategis *e-Government* LAPAN yang dapat dijadikan acuan untuk menentukan arah dan tujuan pengembangan *e-Government* sehingga terdapat keselarasan antara kebijakan yang diambil pimpinan LAPAN dengan *Materplan TI* yang telah ditetapkan;
- 3) membuat pedoman mengenai proses dan prosedur penerapannya serta membuat peraturan dan mensosialisasikan kepada seluruh Unit Kerja di lingkungan LAPAN,
- 4) menyediakan anggaran untuk pembangunan infrastruktur, aplikasi dan sarana pelayanan serta pengoperasian dan pemeliharaan TIK sebagai pendukung *e-Government* karena tanpa anggaran maka proses pelayanan LAPAN yang diberikan kepada masyarakat atau stakeholder lainnya tidak akan dapat berjalan dengan baik (bisa berhenti);
- 5) menentukan skala prioritas agar arah pengembangan *e-Government* di LAPAN menjadi lebih fokus dan bersinergi serta berkesinambungan sehingga tepat sasaran;
- 6) melakukan audit untuk mengetahui apakah pemanfaatan TIK sebagai pendukung *e-Government* LAPAN sesuai dengan perencanaan atau tidak, mengukur investasi pemanfaatan TIK sebagai pendukung *e-Government* apakah membawa keuntungan atau kerugian bagi LAPAN dari segi pelayanan publik.

Dengan mengakselerasi implementasi *e-Government* untuk dimensi kebijakan tersebut, maka kebijakan Pimpinan LAPAN dalam pengembangan *e-Government* menjadi benar-benar sangat diperlukan dan strategis karena merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan yang sangat menentukan dalam implementasi *e-Government*. Hal ini diperkuat hasil penelitian Prihanto (2012) yang menyatakan komitmen pimpinan

LAPAN untuk menerapkan konsep *e-Government* tentunya bukan hanya sekedar mengikuti tren, karena tanpa adanya *political will* dari pimpinan tertinggi LAPAN maka mustahil berbagai inisiatif pembangunan dan pengembangan *e-Government* di LAPAN dapat berjalan dengan mulus.

- b. Dimensi kelembagaan. Berbeda dengan posisi dimensi kebijakan (peringkat ke-11), karena tingkat capaian implementasi *e-Government* LAPAN untuk dimensi kelembagaan (peringkat ke-16) ternyata jauh lebih rendah dari dimensi kebijakan, meskipun masih berkategori baik. Posisi LAPAN untuk dimensi ini jika dikomparasikan dengan LPNK yang lain dapat dikatakan jauh lebih baik (lebih tinggi) dibanding dengan LKPP, BKPM, LEMSANEG, BASARNAS, BNP2TKI, BNN, LAN dan BNPT. Meskipun demikian, tidak bisa dipungkiri bahwa keberhasilan LAPAN tersebut juga masih ketinggalan jauh (lebih rendah) apabila dibanding dengan BPS, BIG, BPKP, LEMHANAS, BPPT, LIPI, BNPB, PNRI, BKKBN, BATAN, BSN, BMKG, BAPETEN, BKN dan BPN. Komparasi LAPAN dengan LPNK lainnya untuk dimensi ini disajikan pada Gambar 3-2.



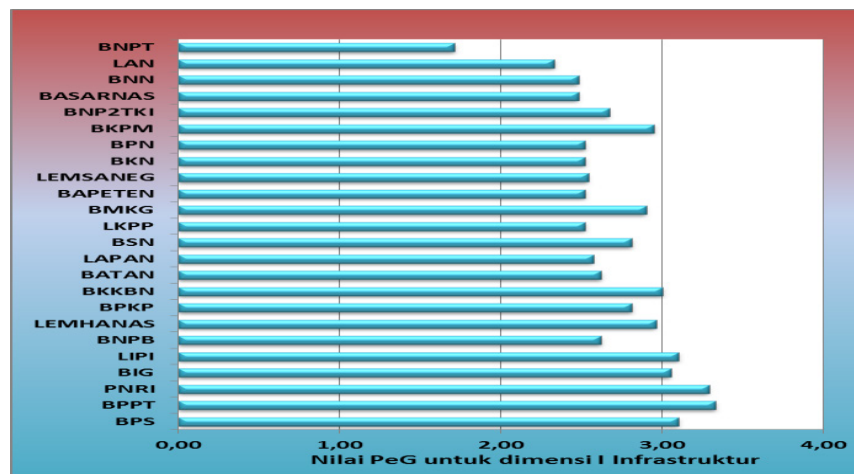
Sumber: Diolah dari hasil PeGI LPNK Tahun 2014 untuk dimensi kelembagaan

Gambar 3-2: Capaian Implementasi *E-Government* LPNK Tahun 2014 Berdasarkan Dimensi Kelembagaan

Untuk mengejar ketinggalan tersebut, maka ke depan LAPAN harus mengejar ketertinggalan dan segera mengakselerasi implementasi *e-Government* untuk dimensi kelembagaan, dengan cara sebagai berikut:

- 1) mengimplementasikan kelembagaan TIK sebagai pendukung pengembangan *e-Government* LAPAN yang telah ditingkatkan dari setingkat eselon IV (Subbag) menjadi setingkat eselon II (Pusat TI dan Standar) dengan dilengkapi tugas pokok dan fungsi yang jelas agar tanggung jawab yang diberikan kepada masing-masing Unit Kerja di lingkungan LAPAN menjadi jelas dan terarah;
- 2) menyusun SOP yang terdokumentasi dengan baik untuk menjelaskan jenis dan prosedur yang harus dilakukan dalam pengembangan *e-Government*;

- 3) menyediakan SDM pengembangan *e-Government* dengan kuantitas dan kualitas yang memadai sehingga terjamin pelayanan dalam infrastruktur maupun aplikasi kepada instansi lainnya, baik layanan G2G, G2B, dan G2C;
  - 4) mengembangkan SDM dengan pendidikan (S2 dan S3) dan pelatihan terkait dengan TIK untuk pengembangan *e-Government* agar tidak gagap teknologi dan mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efisien dan efektif.
- c. Dimensi Infrastruktur. Tingkat capaian implementasi *e-Government* LAPAN untuk dimensi infrastruktur menduduki posisi pada peringkat ke-15. Posisi ini jauh lebih baik dari posisi dimensi kelembagaan (peringkat ke-16) tetapi masih di bawah dimensi kebijakan (peringkat ke-11). Posisi LAPAN untuk dimensi ini jika dikomparasikan dengan LPNK yang lain dapat dikatakan jauh lebih baik (lebih tinggi) dibanding dengan LKPP, BAPETEN, LEMSANEG, BKN, BPN, BASARNAS, BNN, LAN dan BNPT. Meskipun demikian, tidak bisa dipungkiri bahwa keberhasilan LAPAN tersebut juga masih ketinggalan jauh (lebih rendah) apabila dibanding dengan BPPT, PNRI, BPS, LIPI, BIG, BKKBN, LEMHANAS, BKPM, BMKG, BPKP, BSN, BNP2TKI, BNPB, BATAN. Komparasi LAPAN dengan LPNK lainnya untuk dimensi ini disajikan pada Gambar 3-3.



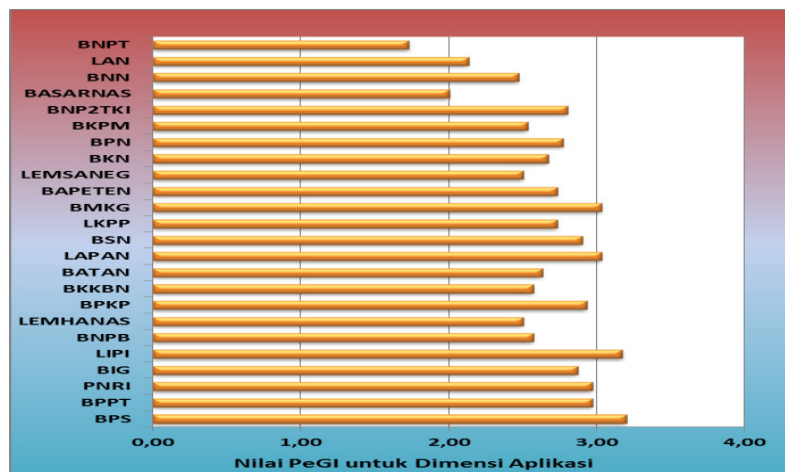
Sumber: Diolah dari hasil PeGI LPNK Tahun 2014 untuk dimensi infrastruktur  
 Gambar 3-3: Capaian Implementasi *E-Government* LPNK  
 Tahun 2014 Berdasarkan Dimensi Infrastruktur

Untuk mengejar ketinggalan tersebut, maka ke depan LAPAN harus segera mengakselerasi implementasi *e-Government* untuk dimensi infrastruktur, dengan cara sebagai berikut:

- 1) membangun *data center* sebagai portal LAPAN untuk menyimpan data dan informasi penerbangan dan antariksa sehingga memudahkan dalam pengaksesan, menjamin keterhubungan dan interoperabilitas antar instansi nasional terkait



- (Kementerian/ Lembaga dan Pemda) maupun dengan Unit Kerja di lingkungan LAPAN;
- 2) membangun jaringan data untuk mendukung pengelolaan informasi elektronik dalam pengembangan *e-Government* sebagai penghubung antar Kementerian/Lembaga dan Pemda maupun dengan masyarakat;
  - 3) menjaga keamanan data dan informasi penerbangan dan antariksa agar layanan internal LAPAN selalu tersedia, dengan data dan informasi penerbangan dan antariksa yang selalu akurat;
  - 4) menyediakan fasilitas pendukung infastruktur TIK dalam pengembangan *e-Government* untuk menjamin ketersediaan layanan informasi penerbangan dan antariksa yang dapat diakses selama 24 jam sehari dan tujuh hari dalam seminggu antara G2G, G2B, dan G2C; dan
  - 5) melakukan inventarisasi peralatan TIK guna mengonrol keberadaan dan ketersediaan serta mengontrol waktu pemakainnya.
- d. Dimensi Aplikasi. Tingkat capaian implementasi *e-Government* LAPAN untuk dimensi ini ternyata menduduki posisi pada peringkat ke-4, sehingga jauh lebih baik dibanding dengan posisi dimensi kebijakan (peringkat ke-11), dimensi kelembagan (peringkat ke-16) dan dimensi infrastruktur (peringkat ke-15). Posisi LAPAN untuk dimensi ini jika dikomparasikan dengan LPNK yang lain dapat dikatakan jauh lebih baik (lebih tinggi) dibanding dengan BPPT, PNRI, BIG, BNPB, LEMHANAS, BPKP, BKKBN, BATAN, BSN, LKPP, BMKG, BAPETEN, LEMSANEG, BKN, BPN, BKPM, BNP2TKI, BASARNAS, BNN, LAN dan BNPT. Meskipun demikian, tidak bisa dipungkiri bawa keberhasilan LAPAN tersebut juga masih ketinggalan jauh (lebih rendah) apabila dibanding dengan BPS dan LIPI. Komparasi LAPAN dengan LPNK lainnya untuk dimensi ini disajikan pada pada Gambar 3-4.



Sumber: Diolah dari hasil PeGI LPNK Tahun 2014 untuk dimensi aplikasi  
 Gambar 3-4: Capaian Implementasi *E-Government* LPNK  
 Tahun 2014 Berdasarkan Dimensi Aplikasi

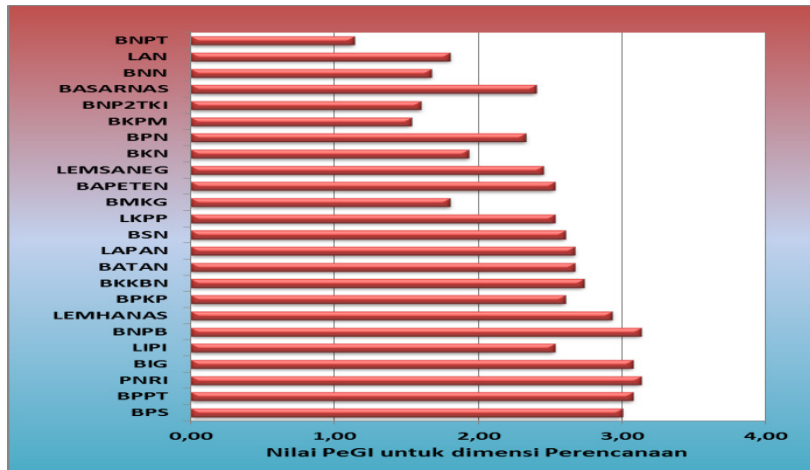


Untuk mengejar ketinggalan tersebut, maka ke depan LAPAN perlu segera mengakselerasi implementasi *e-Government* untuk dimensi aplikasi, dengan cara sebagai berikut:

- 1) membangun *website* yang digunakan sebagai media komunikasi dan informasi penerbangan dan antariksa dengan masyarakat atau dengan stakeholder lainnya;
- 2) membangun aplikasi fungsional dan manajemen, pembangunan, keuangan, dan kepegawaian untuk mempermudah birokrasi yang handal;
- 3) membangun aplikasi fungsional dan legislasi untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan aktivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik;
- 4) membuat manual aplikasi TIK untuk sosialisasi proses atau cara kerja aplikasi agar bisa dimanfaatkan secara optimal; dan
- 5) menginventarisasi aplikasi TIK guna mengonrol keberadaan dan ketersediannya agar kegiatan evaluasi fungsi bisa terkontrol.

Beberapa langkah akselerasi implementasi *e-Government* untuk dimensi tersebut ternyata sangat sejalan dengan pendapat Indrajit (2002) yang dikutip oleh Prihanto (2012) karena dengan kondisi tersebut maka aplikasi *e-Government* yang dibangun oleh LAPAN harus benar-benar memberikan manfaat secara signifikan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat atau dengan stakeholder lainnya.

- e. Dimensi Perencanaan. Tingkat capaian implementasi *e-Government* LAPAN untuk dimensi perencanaan ini ternyata menduduki posisi pada peringkat ke-9, sehingga jauh lebih baik dibanding dimensi kebijakan (peringkat ke-11), kelembagan (peringkat ke-16) dan infrastruktur (peringkat ke-15) tetapi masih lebih rendah dari dimensi aplikasi (peringkat ke-3). Posisi LAPAN ini jika dikomparasikan dengan LPNK yang lain dapat dikatakan jauh lebih baik dibanding dengan BPKP, BSN, LIPI, LKPP, BAPETEN, BAPETEN LEMSANEG, BASARNAS, BPN, BKN, BMKG, LAN, BNN, BNP2TKI, BKPM dan BNPT. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan LAPAN masih ketinggalan jauh apabila dibanding dengan PNRI, BNPB, BPPT, BIG, BPS, LEMHANAS, BKKBN dan BATAN. Komparasi LAPAN dengan LPNK lainnya untuk dimensi ini disajikan pada Gambar 3-5.



Sumber: Diolah dari hasil PeGI LPNK Tahun 2014 untuk dimensi perencanaan

Gambar 3-5: Capaian Implementasi *E-Government* LPNK Tahun 2014 Berdasarkan Dimensi perencanaan

Untuk mengejar ketinggalan tersebut, maka ke depan LAPAN harus segera mengakselerasi implementasi *e-Government* untuk dimensi perencanaan, dengan cara sebagai berikut:

- 1) melakukan pengorganisasian yang diperlukan sebagai dukungan *Masterplan TI* LAPAN untuk pengembangan dan pemanfaatan TIK yang dilakukan secara nyata guna mengantisipasi teknologi ke depan;
- 2) menentukan program pengembangan TIK sebagai peta pedoman dalam strategi pelaksanaan pengembangan TIK sebagai pendukung *e-Government* dalam *masterplan IT* LAPAN;
- 3) menyusun sistem perencanaan agar pengembangan *e-Government* sesuai dengan *Masterplan TI* yang telah ditetapkan sehingga tepat sasaran, teknologi yang dipilih dan dikembangkan tepat guna, dan anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal;
- 4) menyediakan dokumen perencanaan secara tertulis agar setiap kebijakan yang dibuat mempunyai payung hukum yang jelas sehingga informasinya terorganisasi dan terkontrol perkembangannya, memudahkan dalam proses pencarian dan sosialisasi serta memudahkan dalam mendukung pengambilan keputusan bagi Pimpinan LAPAN. Jadi dalam pengembangan *e-Government* harus selalu mengacu pada standar yang baku berdasarkan *masterplan IT* yang telah ditetapkan.

## 5. KESIMPULAN

Dari hasil dan pembahasan diperoleh hasil uji statistik bahwa nilai hitung  $\chi^2_r = 1.449,942$  lebih besar dari nilai tabel Chi-Kuadrat  $\chi^2_{\alpha, k-1} = 9,488$  untuk derajat kebebasan (db)=4 dan tingkat signifikan  $\alpha = 0,05$ . Ini berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima pada tingkat signifikan tersebut. Hasil uji ini dapat diinterpretasikan bahwa ada perbedaan tingkat capaian implementasi *e-Government* pada tingkat LPNK di Indonesia yang sangat

signifikan berdasarkan dimensi kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan. Secara umum tingkat capaian implementasi *e-Government* pada tingkat LPNK di Indonesia ada yang telah melaju dengan cepat (berkategori baik) tetapi ada juga yang masih tertinggal secara nasional (masih berkategori kurang baik).

Komparasi LAPAN dengan LPNK lainnya menunjukkan bahwa tingkat capaian implementasi *e-Government* LAPAN dapat dikatakan jauh lebih baik dibanding dengan BSN, LKPP, BMKG, BAPETEN, LEMSANEG, BKN, BPN, BKPM, BNP2TKI, BASARNAS, BNN, LAN, BNPT. Sebaliknya jika dikomparasikan dengan BPS, BPPT, PNRI, BIG, LIPI, BNPB, LEMHANAS, BPKP, BKKBN, BATAN maka tingkat capaian implementasi *e-Government* LAPAN masih sangat ketinggalan jauh. Berdasarkan dimensinya, komparasi LAPAN dengan LPNK lainnya menunjukkan bahwa tingkat capaian implementasi *e-Government* LAPAN untuk dimensi aplikasi ternyata jauh lebih baik (peringkat ke-3) apabila dibanding dimensi perencanaan yang menduduki peringkat ke-9, dimensi kebijakan yang menduduki posisi pada peringkat ke-11, dimensi infrastruktur yang menduduki peringkat ke-15 dan dimensi kelembagaan yang menduduki peringkat ke-16.

## 6. UCAPAN TERIMA KASIH

Pada makalah ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada Kepala Pusat Pengkajian dan Informasi Kedirgantaraan LAPAN atas dukungan dan diijinkannya hasil penelitian ini untuk dipublikasikan.

## DAFTAR ACUAN

- Al-adawi, Z., S. Yousatzai., J. Pallister., 2005, *Conceptual Model of Citizen Adoption of E-Government*, The Second International Conference on Innovations in Information Technology.
- Alshomrani, Saleh., 2012, *A Comparative Study on United Nations e-Government Indicators Between Saudi Arabia and USA*, Journal of Emerging Trends in Computing and Information Sciences, 3(3)
- Ariyani, Pipin Farida., 2013, *Kajian Kerangka Kerja Pemingkatan E-Government di Tingkat Kabupaten/Kotamadya*, Budi Luhur Information Technology (BIT), 10(1)
- Djarwanto, 1995, *Statistik Non Parametrik*, BPFE, Yogyakarta
- Fitriansyah, Ahmad., Hary Budiarto., dan Joko Santoso, 2013, *Metode Pemingkatan E-Government Indonesia (PeGI) Untuk Audit Tata Kelola Teknologi Informasi*. Prosiding Seminar Nasional Sistem Informasi Indonesia (Sesindo), Bali, 2-4 Desember.
- Furuholt, Bjorn., And Wahid Fathul, 2008, *E-Government Challenges and The Role Of Political Leadership in Indonesia: The Case of Sragen*, Proceedings of the 41 st Hawaii Internatianol Conference on System Sciences.
- Handayani, Putu Wuri., and Nurulita Prihasti Kardia, 2012, *Analisis Tingkat Pengembangan e-Government pada Level Kementerian Indonesia Berdasarkan Framework Deloitte & Tuch*, Journal of Information System, 6(2).

- Hasibuan, Zainal A., 2007. *Langkah-langkah Strategis dan Taktis Pengembangan E-Government Untuk Pemda*. Jurnal Sistem Informasi MTI UI, 3(1).
- Hernikawati, Dewi., 2013, *Pengelompokan Implementasi E-Government Tingkat Provinsi Dengan Analisis Klaster*, Jurnal IPTEK-KOM, 15(1).
- Holle, Erick S., 2011, *Pelayanan Publik Melalui Electronic Government: Upaya meminimalisir praktek maladministrasi dalam meningkatkan public service*. Jurnal Sasi, 17(3).
- Indrajit, Richardus Eko., 2002, *Electroninc Government: Strategi pengembangan dan pengembangan sistem pelayanan publik berbasis teknologi digital*. Yogyakarta, Andi Offset.
- Istiyanto, Jazi Eko., dan Edhy Sutanta, 2012, *Model Interoperabilitas Antar Aplikasi E-Government*. Jurnal Teknologi Technoscientia, 4(2).
- Junaidi, 2011, *Dukungan E-Government Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Di Era Otonomi Daerah: Kasus best practices dari sejumlah daerah di Indonesia*, Proceeding Simposium Nasional Otonomi Daerah 2011 LAB-ANE FISIP Untirta.
- Kemenkominfo RI, 2014, *Tabel Hasil Pemingkatan e-Government Indonesia (PeGI)*, <http://pegi.layanan.go.id/tabel-hasil-peg-4/>, diunduh 15 September 2015
- Prihanto, Igif G., 2012, *Analisis Implementasi E-Government Pada Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi DI Indonesia*, Jurnal Analisis dan Informasi Kedirgantaraan, 9(1)
- Sari, Kusuma Dewi Arum., dan Wahyu Agus Winarno, 2012, *Implementasi E-Government System Dalam Upaya Peningkatan Clean And Good Governance Di Indonesia*, Jurnal Ekonomi, Akuntansi, dan Manajemen (JEAM), XI (1)
- Sinambela, Josua M. 2011. *E-Government di Indonesia dan Dunia*. STTA, Yogyakarta, 18 Juni 2011
- Sosiawan, Edwi Arief., 2008, *Evaluasi Implementasi E-Government Pada Situs Pemerintah Daerah di Indonesia: Perspektif Content dan Manajemen*, Prosiding Seminar Nasional Informatika 2008 (semnasIF 2008), UPN "Veteran" Yogyakarta, 24 Mei.
- Sufianti, Ely., 2007, *Aplikasi e-Government Dalam Meningkatkan Kualitas pelayanan publik Pada Beberapa Pemerintah Daerah Kota/ Kabupaten di Indonesia*, Jurnal Ilmu Administrasi, V(4).
- Usman, Husaini., dan Purnomo Setiadi Akbar, 1996, *Metodologi Penelitian Sosial*. Bumi Aksara, Jakarta.